

TATA KELOLA UMKM DI INDONESIA

**Memperkuat Kelembagaan
dan Mengoptimalkan Pelibatan
Anak Muda dalam Ekosistem
Kewirausahaan Nasional**



20 26

■ RINGKASAN EKSEKUTIF ■

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari **60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)** dan penyerapan sekitar **97% tenaga kerja nasional** (BPS, 2024; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Namun demikian, struktur UMKM Indonesia masih sangat timpang: sekitar 97–99% dari total unit usaha berskala mikro, dengan tingkat produktivitas, formalitas, dan akses pembiayaan yang rendah. Di sisi lain, Indonesia tengah berada pada puncak bonus demografi—generasi muda (Gen Z dan Milenial) mencakup lebih dari 50% populasi—namun tingkat pengangguran terbuka usia 15–24 tahun mencapai 16,89% pada Agustus 2025, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,85% (BPS, 2025).

Policy brief ini menganalisis kondisi empiris tata kelola UMKM Indonesia—mencakup kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan—serta mengidentifikasi peluang dan hambatan pelibatan anak muda sebagai pelaku usaha maupun agen transformasi digital UMKM. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan langkah kelembagaan signifikan, seperti pembentukan Kementerian UMKM tersendiri pada Oktober 2024 (Peraturan Presiden No. 196/2024) dan penerbitan POJK No. 19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, tingkat partisipasi anak muda dalam kewirausahaan formal masih rendah—hanya sekitar **6,1 juta orang usia 20–29 tahun (kurang dari 11%)** yang tercatat sebagai wirausahawan (BPS, dikutip dalam Jawa Pos, 2024). Sementara itu, minat berwirausaha di kalangan Gen Z dan Milenial justru tinggi—masing-masing 64% dan 76%—namun terkendala oleh keterbatasan modal, rendahnya toleransi terhadap risiko kegagalan (Indonesia berada di peringkat ke-40 dari 43 negara pada indikator *fear of failure* menurut Global Entrepreneurship Monitor), dan kesenjangan literasi digital serta keuangan.

Rekomendasi utama brief ini mencakup: (1) penguatan integrasi data tunggal UMKM dan pemuda lintas kementerian/lembaga; (2) reformasi skema pembiayaan mikro yang berbasis credit scoring alternatif bagi wirausaha pemula; (3) penguatan kurikulum kewirausahaan dan inkubasi bisnis berbasis sekolah/kampus; (4) insentif fiskal dan non-fiskal bagi UMKM yang dipimpin anak muda dan berbasis teknologi; serta (5) penguatan koordinasi antara Kementerian UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenpora, dan pemerintah daerah dalam satu kerangka kebijakan kewirausahaan pemuda yang terukur dan berkelanjutan.

■ PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG ■

Sejak krisis moneter 1998, UMKM secara konsisten terbukti sebagai penyangga ekonomi Indonesia yang relatif tahan terhadap guncangan makroekonomi, termasuk pada masa pandemi COVID-19. Karakteristik UMKM yang padat karya, tersebar di seluruh wilayah, dan berbasis kebutuhan lokal menjadikannya instrumen strategis untuk pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Data terbaru menunjukkan jumlah UMKM non-pertanian yang tercatat dalam Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM per 31 Desember 2025 mencapai **30.209.069 unit usaha**, meningkat tipis dari 30.178.617 unit pada akhir 2024 (UKM Indonesia/Kementerian UMKM, 2025). Jika mencakup sektor pertanian dan jasa yang belum terdata penuh, estimasi total UMKM nasional mencapai **64–65 juta unit usaha** (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024; Kementerian Keuangan, 2024).

Di sisi lain, Indonesia sedang berada pada periode bonus demografi, dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, generasi Z (lahir 1997–2012) mencakup 27,94% dan generasi milenial (lahir 1981–1996) mencakup 25,87% dari total populasi (BPS, 2020). Kombinasi antara besarnya populasi muda dan dominasi UMKM dalam struktur ekonomi nasional menempatkan pelibatan anak muda dalam ekosistem UMKM sebagai isu kebijakan yang mendesak—baik sebagai strategi mitigasi pengangguran muda maupun sebagai akselerator transformasi digital dan daya saing UMKM ke depan.

Namun, tata kelola UMKM di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural: fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih program antarkementerian, rendahnya integrasi data, serta kesenjangan antara besarnya potensi demografis anak muda dan rendahnya realisasi partisipasi mereka dalam kewirausahaan formal. Brief ini disusun untuk memetakan kondisi empiris tersebut secara komprehensif dan merumuskan arah kebijakan yang implementatif.

■ POTRET EMPIRIS UMKM INDONESIA ■

1. Skala, Kontribusi Ekonomi, dan Struktur Sektoral

UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional atau setara sekitar **Rp9.580 triliun per tahun** (Kementerian UMKM, dikutip UKM Indonesia, 2025), naik dari Rp8.573,89 triliun (61,07% PDB) pada 2023 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Sektor ini menyerap sekitar **119 juta tenaga kerja** menurut data terbaru Kementerian UMKM, meski publikasi sebelumnya mencatat kisaran 97 juta–117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (Kementerian Keuangan, 2021; Kemenko Perekonomian, 2025). Kontribusi

UMKM, meski publikasi sebelumnya mencatat kisaran 97 juta–117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (Kementerian Keuangan, 2021; Kemenko Perekonomian, 2025). Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional relatif masih kecil, yakni sekitar **15,7% dari total ekspor** (Kemenko Perekonomian, 2025), mengindikasikan orientasi pasar UMKM yang masih didominasi pasar domestik.

Indikator	Nilai	Sumber/Tahun
Jumlah UMKM non-pertanian tercatat (SIDT)	30,2 juta unit (Des 2025)	Kementerian UMKM, 2025
Estimasi total UMKM (seluruh sektor)	64–65 juta unit	Kemenkop UKM/Kemenkeu, 2024
Kontribusi terhadap PDB	60,4% (≈Rp9.580 T)	Kementerian UMKM, 2025
Penyerapan tenaga kerja	≈97% dari total tenaga kerja	Kemenko Perekonomian, 2025
Kontribusi terhadap ekspor nasional	15,7% dari total ekspor	Kemenko Perekonomian, 2025
Kontribusi PDB saat pandemi (2020–2021)	Turun menjadi 37,3%	Jannah & Hayuningtias, 2024
Tingkat inklusi keuangan nasional	88,70%	Kemenko Perekonomian, 2025

Sumber: BPS (2024); Kementerian UMKM (2025); Direktorat Jenderal Pajak (2024); Kemenko Perekonomian (2025); UKM Indonesia (2025).

Dari sisi sebaran sektor, data Kementerian UMKM per akhir 2025 menunjukkan dominasi sektor **perdagangan besar dan eceran** dengan 14,44 juta unit usaha, diikuti **penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman** sebanyak 6,41 juta unit, dan **industri pengolahan** sebanyak 4,17 juta unit (UKM Indonesia, 2025). Struktur ini menunjukkan bahwa UMKM Indonesia masih terkonsentrasi pada aktivitas distribusi dan konsumsi harian, dengan porsi hilirisasi manufaktur yang relatif kecil—suatu tantangan tersendiri bagi agenda peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.

2. Digitalisasi dan Akses Pasar

Transformasi digital menjadi salah satu jalur utama peningkatan daya saing UMKM. Hingga 2023, sekitar **22 juta UMKM** telah melakukan onboarding ke platform digital dari target 30 juta unit pada 2024 (Kemenkop UKM/Kominfo, dikutip dalam Jurnal MAJIM, 2025), dan sebanyak **83,8% pelaku UMKM** dilaporkan telah memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung operasional bisnis pascapandemi (Jannah & Hayuningtias, 2024). Meski demikian, survei KemenkopUKM bersama Indonesian E-Commerce Association (iDEA) menemukan bahwa **75% UMKM** kesulitan mempertahankan keberlanjutan usaha setelah masuk ke platform e-commerce, terutama dalam menjaga karakteristik layanan dan purna jual (KemenkopUKM, 2021). Studi Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (2023) mengidentifikasi empat hambatan struktural utama digitalisasi UMKM: kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi digital pelaku usaha, keterbatasan akses pembiayaan digital, dan kompleksitas regulasi yang belum harmonis.

3. Pembiayaan dan Inklusi Keuangan

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap menjadi instrumen pembiayaan utama UMKM. Realisasi KUR nasional tahun 2025 mencapai sekitar **Rp270 triliun atau 96% dari target**, namun hanya menjangkau sekitar 4,58 juta debitur (Kementerian UMKM, dikutip dalam kajian ResearchGate, 2025). Data per triwulan I 2026 menunjukkan realisasi KUR mencapai Rp159,8 triliun kepada 2,5 juta debitur, dengan 83,5% dari target debitur baru tahun berjalan telah tercapai dan penyaluran ke sektor produksi mencapai 64,6% dari target (Antara News, 2026). Meski cakupan terus meluas, kesenjangan akses pembiayaan formal bagi usaha ultramikro masih signifikan: dari sekitar **57 juta pelaku usaha ultramikro**, hanya sekitar **20% yang memiliki akses pembiayaan formal** (INDEF, 2021, dikutip dalam kajian pembiayaan ultramikro, 2025), akibat tingginya proporsi usaha informal, keterbatasan legalitas, dan rendahnya kualitas pencatatan keuangan. Untuk merespons hal ini, OJK menerbitkan **POJK No. 19 Tahun 2025** tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM yang mewajibkan bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank menerapkan skema pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, termasuk penguatan tata kelola dan manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan UMKM (OJK, 2025).

POTRET ANAK MUDA DAN KEWIRAUSAHAAN

1. Demografi dan Kondisi Ketenagakerjaan Muda

Generasi muda Indonesia (Gen Z dan Milenial) berjumlah lebih dari 67 juta jiwa atau sekitar 24,3% dari total populasi menurut data BPS Februari 2022, dengan estimasi terbaru Gen Z mencapai 74,93 juta jiwa dan Milenial 69,38 juta jiwa (BPS, dikutip dalam Jawa Pos, 2024). Kendati potensi demografis besar, kondisi ketenagakerjaan muda menunjukkan tantangan serius. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 mencatat **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15–24 tahun sebesar 16,89%**, jauh di atas TPT nasional 4,85% dan TPT kelompok usia 25–59 tahun yang hanya 2,93% (BPS, 2025). Lebih jauh, **23,79% pemuda** tergolong NEET (Not in Employment, Education, and Training) menurut Sakernas Agustus 2024, dengan proporsi tertinggi pada kelompok usia 19–24 tahun (26,37%) dan lulusan SMA/SMK (26%) (BPS, dikutip Kompas, 2025).

16,89% TPT usia 15–24 tahun (Agustus 2025)	23,79% Pemuda kategori NEET (Agustus 2024)	43,05% Pengangguran usia 15– 24 th dari total pengangguran nasional	7,46 juta Total penduduk menganggur (Ags 2025)
---	---	---	---

Data ini menegaskan adanya "skills-jobs mismatch" struktural: TPT justru tertinggi pada lulusan SMK (8,63%) dan SMA (6,88%), melampaui TPT lulusan perguruan tinggi (5,39%) (BPS, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan vokasi belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja maupun ekosistem kewirausahaan, sehingga jalur wirausaha idealnya menjadi alternatif strategis penyerapan angkatan kerja muda.

2. Minat dan Realisasi Kewirausahaan Muda

Terdapat kesenjangan signifikan antara minat dan realisasi wirausaha di kalangan anak muda. Survei Indonesia Millennial and Gen Z Report (2022) menunjukkan **64% Gen Z dan 76% Milenial** tertarik menjadi wirausaha (Kemenparekraf, dikutip UKM Indonesia, 2024), dan survei World Economic Forum (2019) mencatat 35,5% pemuda usia 15–35 tahun berkeinginan menjadi pengusaha—termasuk yang tertinggi di ASEAN (Kemenko PMK, 2023). Namun realisasinya jauh lebih rendah: data BPS menunjukkan hanya sekitar **6,1 juta orang usia 20–29 tahun (kurang dari 11%)** yang benar-benar berstatus wirausahawan (BPS, dikutip Jawa Pos, 2024). Sumber lain menyebut proporsi wirausaha pemuda mencapai 19% dari populasi pemuda dan rasio kewirausahaan nasional secara keseluruhan pada 2021 hanya 3,47%—jauh di bawah Singapura (8,5%) dan negara maju lainnya (14–15%) (Kemenparekraf, dikutip UKM Indonesia, 2024; GoodStats, 2026).

Indikator Kewirausahaan Pemuda	Nilai
Minat berwirausaha Gen Z	64%
Minat berwirausaha Milenial	76%
Keinginan menjadi pengusaha (usia 15–35 th, WEF 2019)	35,50%
Realisasi wirausaha muda usia 20–29 tahun	≈6,1 juta orang (<11%)
Rasio kewirausahaan nasional (2021)	3,47%
Rasio kewirausahaan Singapura (pembanding)	8,50%
Peringkat Indonesia — fear of failure (GEM)	40 dari 43 negara

Sumber: Kemenparekraf/UKM Indonesia (2024); Kemenko PMK (2023); BPS/Jawa Pos (2024); Global Entrepreneurship Monitor, dikutip Kemenko PMK (2023).

Laporan Global Entrepreneurship Monitor menempatkan Indonesia pada peringkat ke-40 dari 43 negara dalam indikator fear of failure (ketakutan akan kegagalan berusaha), menjadikannya salah satu hambatan psikologis dan budaya terbesar bagi tumbuhnya wirausaha muda baru (Kemenko PMK, 2023). Kajian Bappenas mengenai Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda (2022) turut mengidentifikasi hambatan lain: ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan pasar, minimnya pemahaman dinamika kewirausahaan, kurangnya dukungan keluarga—yang cenderung mendorong anak muda menjadi PNS atau karyawan—serta terbatasnya akses permodalan, pemasaran, dan jejaring bisnis.

KERANGKA TATA KELOLA: KELEMBAGAAN DAN REGULASI

1. Reformasi Kelembagaan: Kementerian UMKM

Langkah kelembagaan paling signifikan dalam tata kelola UMKM belakangan ini adalah pembentukan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) yang berdiri sendiri, dipisahkan dari Kementerian Koperasi dan UKM, melalui Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 pada era Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto (Wikipedia/Setkab, 2024; CNN Indonesia, 2025). Kementerian ini memiliki lima unit kerja eselon I dan satu Badan Layanan Umum (BLU), dengan tujuan

agar penanganan isu UMKM—yang mencakup sekitar 60 juta pelaku usaha dan menciptakan hingga 90% lapangan kerja menurut pernyataan Menteri UMKM—dapat lebih fokus dan terakselerasi (Republika, 2024; CNN Indonesia, 2025). Proses transisi kelembagaan ini dinyatakan hampir sepenuhnya rampung pada Januari 2025.

Sebagai bagian dari strategi transformasi, Kementerian UMKM meluncurkan tiga inisiatif utama pada 2026: pendataan dan layanan terintegrasi melalui aplikasi SAPA UMKM, pelatihan wirausaha baru melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) Produktif, dan pendampingan pengembangan usaha melalui lembaga inkubator (Golkarpedia, 2026). Program lain yang berjalan sejak 2024 antara lain UMKM Level Up yang telah dilaksanakan di 19 kota/kabupaten di Jawa, Bali, dan Sumatera (Jurnal EBISMEN, 2025).

2. Kerangka Regulasi Pembiayaan dan Perlindungan Usaha

- **UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)** — menjadi dasar hukum penguatan akses pembiayaan UMKM oleh sektor jasa keuangan.
- **POJK No. 19 Tahun 2025** tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM — mewajibkan bank dan LKNB menerapkan skema pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko penyaluran pembiayaan (OJK, 2025).
- **Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2022** tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) 2021–2024 — menjadi pedoman tunggal bagi seluruh pemangku kepentingan terkait pengembangan kewirausahaan, termasuk kewirausahaan pemuda (Kemenko PMK, 2023).
- **Skema pembiayaan berjenjang:** Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam, yang menyasar segmen usaha mikro hingga ultramikro dengan tingkat formalitas berbeda (Kemenko Perekonomian, 2025).
- Kebijakan afirmatif tambahan pada 2025, termasuk penghapusan utang macet bagi UMKM, petani, dan nelayan, serta rencana subsidi bunga hingga 5% bagi kredit investasi UMKM padat karya di sektor tekstil, garmen, alas kaki, makanan-minuman, dan furnitur (Kemenko Perekonomian, 2025).

3. Fragmentasi dan Tantangan Koordinasi

Meski kerangka regulasi terus diperkuat, tata kelola UMKM di Indonesia masih menghadapi fragmentasi kelembagaan yang signifikan. Program kewirausahaan pemuda saat ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga—Kementerian UMKM, Kementerian

Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pemerintah daerah—tanpa kerangka koordinasi tunggal yang terintegrasi. Kajian evaluasi program KUR oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahkan menemukan bahwa penyaluran KUR belum sepenuhnya tepat sasaran dan cenderung lebih menguntungkan pihak perbankan serta perusahaan penjamin dibandingkan kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan (LIPI, dikutip dalam kur.ekon.go.id). Kajian terbaru mengenai ekosistem pembiayaan ultramikro juga merekomendasikan integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penargetan dan penilaian kelayakan pembiayaan yang lebih akurat (kajian ResearchGate, 2025).

■ TANTANGAN UTAMA PELIBATAN ANAK MUDA DALAM EKOSISTEM UMKM ■

1. Tantangan pada Sisi Individu Muda

- **Ketakutan akan kegagalan (fear of failure)** — Indonesia berada di peringkat ke-40 dari 43 negara pada indikator ini menurut Global Entrepreneurship Monitor, mencerminkan rendahnya toleransi risiko dan lemahnya bantalan sosial bagi wirausaha pemula (Kemenko PMK, 2023).
- **Kesenjangan literasi keuangan dan kewirausahaan** — banyak anak muda belum memahami dinamika bisnis, manajemen risiko, dan pencatatan keuangan dasar (Bappenas, 2022).
- **Dukungan keluarga yang terbatas** — norma sosial masih cenderung mendorong anak muda memilih jalur PNS/karyawan dibanding wirausaha (Bappenas, 2022).
- **Ketimpangan pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar** — TPT lulusan SMK justru tertinggi (8,63%), menandakan pendidikan kejuruan belum efektif membekali kompetensi kewirausahaan maupun kerja (BPS, 2025).

2. Tantangan pada Sisi Struktural/Kelembagaan

- **Akses permodalan yang timpang** — dari 57 juta usaha ultramikro, hanya sekitar 20% memiliki akses pembiayaan formal, akibat asimetri informasi dan rendahnya legalitas usaha (INDEF, 2021).
- **Kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah** — terutama di daerah tertinggal dan pegunungan, membatasi partisipasi pemuda daerah dalam ekonomi digital (LIPI, 2023; jurnal Undip, 2025).

- **Keberlanjutan usaha pasca-onboarding digital rendah** — 75% UMKM kesulitan mempertahankan bisnis setelah masuk platform e-commerce karena lemahnya diferensiasi produk dan layanan purna jual (KemenkopUKM/iDEA, 2021).
- **Fragmentasi program lintas kementerian** — tumpang tindih inisiatif kewirausahaan pemuda tanpa basis data dan indikator kinerja yang terpadu.
- **Persaingan pasar digital yang tidak selalu adil** — banjirnya produk impor murah di marketplace dan algoritma yang belum berpihak pada penjual kecil (Jakarta Amanah, 2025).

■ PRAKTIK BAIK DAN INISIATIF YANG SUDAH BERJALAN ■

Program/Inisiatif	Penyelenggara	Fokus & Capaian
UMKM Level Up	Kementerian UMKM	Pendampingan naik kelas di 19 kota/kabupaten (Jawa, Bali, Sumatera), 2024
SAPA UMKM & Pro-Kesra Produktif	Kementerian UMKM	Pendataan terintegrasi dan pelatihan wirausaha baru, 2026
Program ACCESS	Kementerian UMKM	Pembiayaan 56 usaha menengah, total Rp53,3 miliar melalui 8 lembaga mitra
Bisnis Layak Funding (BISLAF)	Kementerian UMKM & Inotek	Pendampingan 200 UMKM memperoleh pendanaan senilai Rp13,65 miliar
KUR & UMi	Kemenko Perekonomian/Perbankan	Realisasi Rp270 triliun (2025), menjangkau 4,58 juta debitur
NextGen Fest & GenPRU	Prudential Indonesia	Literasi keuangan dan jejaring wirausaha muda, >2.000 peserta
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas	Shopee Indonesia	Kompetisi dan mentoring bagi pelaku UMKM digital
Entrepreneur Hub	Kementerian UMKM (sebelumnya Kemenkop UKM)	Platform pengembangan wirausaha muda inovatif dan kompetitif

Sumber: Diolah dari berbagai rilis resmi Kementerian UMKM, Kemenko Perekonomian, Antara News, GoodStats, Jawa Pos, dan Golkarpedia (2024–2026).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pemetaan empiris di atas, brief ini merumuskan lima klaster rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan jangka waktu implementasi.

1. Jangka Pendek (0–1 Tahun)

- **Integrasi basis data tunggal** antara SIDT-UMKM (Kementerian UMKM), Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan data kependudukan pemuda (Kemenpora/BPS) untuk penargetan program yang lebih presisi dan mengurangi duplikasi bantuan.
- **Perluasan skema credit scoring alternatif** (berbasis transaksi digital, histori pembayaran non-bank) sebagaimana diamanatkan POJK No. 19/2025, khusus bagi wirausaha muda pemula tanpa agunan konvensional.
- **Standardisasi kurikulum pendampingan pasca-onboarding digital** untuk menekan angka drop-out UMKM dari platform e-commerce yang saat ini mencapai 75%.

2. Jangka Menengah (1–3 Tahun)

- **Penguatan pendidikan kewirausahaan berbasis kompetensi** di jenjang SMK dan perguruan tinggi vokasi, mengingat TPT lulusan SMK adalah yang tertinggi secara nasional (8,63%), dengan penekanan pada praktik bisnis riil, bukan hanya teori.
- **Skema inkubasi dan mentoring berjenjang** yang menghubungkan wirausaha muda pemula dengan pelaku UMKM mapan dan investor sosial, guna mengurangi fear of failure melalui pendampingan nyata dan jejaring pasar.
- **Insentif fiskal berlapis** (a.l. keringanan pajak final UMKM, subsidi bunga kredit produktif) yang secara eksplisit memprioritaskan usaha yang dipimpin atau mayoritas dikelola anak muda usia 18–30 tahun.
- **Pemerataan infrastruktur digital** di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) sebagai prasyarat partisipasi setara pemuda daerah dalam ekonomi digital.

3. Jangka Panjang (3–5 Tahun)

- **Kerangka kebijakan kewirausahaan pemuda nasional tunggal** yang mengintegrasikan seluruh program lintas kementerian (UMKM, Ketenagakerjaan, Kemenpora, Kemenparekraf) dalam satu peta jalan terukur, dengan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas dan dievaluasi berkala.

- **Reformasi budaya risiko kewirausahaan** melalui kampanye publik dan keterlibatan keluarga/komunitas, guna menggeser norma sosial yang masih memprioritaskan status PNS/karyawan di atas jalur wirausaha.
- **Pengembangan ekosistem modal ventura sosial dan pembiayaan berbasis kinerja (revenue-based financing)** sebagai alternatif KUR bagi UMKM rintisan berbasis teknologi yang dijalankan anak muda.
- **Evaluasi independen berkala** atas ketepatan sasaran program pembiayaan UMKM dan kewirausahaan pemuda, mengingat temuan BPK dan LIPI sebelumnya tentang lemahnya ketepatan sasaran KUR

Klaster Waktu	Fokus Utama	Indikator Keberhasilan
Jangka Pendek (0–1 th)	Integrasi data & pembiayaan alternatif	Basis data tunggal aktif; jumlah debitur muda baru meningkat
Jangka Menengah (1–3 th)	Pendidikan, inkubasi, insentif fiskal	Penurunan TPT SMK; jumlah UMKM naik kelas dipimpin pemuda
Jangka Panjang (3–5 th)	Kerangka kebijakan tunggal & reformasi budaya risiko	Rasio kewirausahaan nasional mendekati rata-rata ASEAN (8–10%)

Sumber: Rekomendasi disusun oleh penulis berdasarkan sintesis data empiris pada Bagian 2–6.

PENUTUP

UMKM akan terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, dan keberhasilan transformasinya sangat bergantung pada sejauh mana generasi muda—yang mendominasi struktur demografi nasional—dapat dilibatkan secara efektif, baik sebagai pelaku usaha baru maupun sebagai motor transformasi digital UMKM yang sudah ada. Kesenjangan antara tingginya minat wirausaha anak muda (64–76%) dan rendahnya realisasi (kurang dari 11%) menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada kurangnya aspirasi, melainkan pada lemahnya ekosistem pendukung: akses modal yang timpang, pendidikan kewirausahaan yang belum berbasis praktik, serta koordinasi kelembagaan yang masih terfragmentasi. Pembentukan Kementerian UMKM tersendiri pada 2024 dan penguatan regulasi pembiayaan melalui POJK No. 19/2025 merupakan langkah awal yang positif, namun keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, integrasi data lintas lembaga, serta keberanian merancang insentif yang secara eksplisit berpihak pada wirausaha muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen, Agustus 2025. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Pemuda Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- Direktorat Jenderal Pajak. WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan Ketentuan Umum. pajak.go.id.
- Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN). (2025). Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Vol. 4, No. 1.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. ekon.go.id.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023). Kewirausahaan Pemuda Berperan Untuk Wujudkan Indonesia Maju. kemenkopmk.go.id.
- Kementerian UMKM/UKM Indonesia. (2025). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. ukmindonesia.id.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. ojk.go.id.
- Antara News. (2026). Realisasi KUR capai Rp159,8 triliun kepada 2,5 juta UMKM.
- CNN Indonesia. (2025). Transisi Kementerian UMKM Segera Rampung, Punya 5 Eselon I-BLU.
- Golkarpedia. (2026). Menteri Maman Abdurrahman Siapkan Tiga Strategi Percepat Transformasi UMKM.
- GoodStats. (2025–2026). Tingkat Pengangguran Terbuka RI Sentuh 4,85% per Agustus 2025; Terus Meningkat, Jumlah Wirausaha Pemuda Indonesia Mencapai 19%.
- Jawa Pos. (2024). Data BPS Sebut hanya Ada 6,1 Juta Entrepreneur Muda di Indonesia.
- Kompas.id. (2025). Generasi Muda dan Kelompok Pendidikan Tinggi Kian Mendominasi Pengangguran di Indonesia.
- Tempo.co. (2025). Angka Pengangguran per Agustus 2025 Tembus 7,46 Juta Orang.
- Bappenas. (2022). Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda 2022.
- Jurnal MAJIM. (2025). Analisis Kebijakan Pengembangan UMKM Digital di Indonesia.
- ResearchGate. (2025). Strategi Kebijakan Penguatan Ekosistem Pembiayaan Usaha Ultramikro yang Inklusif Berbasis Data Terpadu.
- Jakarta Amanah. (2025). Percepatan Transformasi Digital UMKM Indonesia 2025.